

Redaksi

Penanggung Jawab:
Dyah N.K. Makhijani
Pemimpin Redaksi:
Difi A. Johansyah
Redaksi Pelaksana:
Harymurthy Gunawan,
Rizana Noor, Dedy Irianto,
Risanthy Uli N

Alamat Redaksi

Humas Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin 2 - Jakarta
Telp. : 021 - 3817317,
3817187
email : humasbi@bi.go.id,
website : www.bi.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan.

Foto: "Kerjasama"
oleh: Agus Suryono



gerai info

Edisi 22 | Januari 2012 | Tahun 3 | Newsletter Bank Indonesia

MEJA REDAKSI

Selamat tahun baru 2012. Redaksi GERAI INFO membuka lembaran di tahun baru ini dengan sesuatu yang baru pula. Mulai edisi Januari dan seterusnya, jumlah halaman *newsletter* ini akan bertambah 4 (empat) halaman. Pergerakan halaman ini sudah barang tentu setelah menyerap berbagai masukan dari sejumlah pembaca setia *newsletter* ini. Dasar pemikirannya setiap kali sebuah topik dipilih memang dirasakan masih banyak hal yang semestinya bisa disuguhkan kepada Anda, namun keterbatasan halaman jua yang membuat kami harus meng seleksi dengan ketat setiap materi dan *angle* tulisan.

Topik bahasan edisi kali ini mengangkat rencana kebijakan Bank Indonesia di tahun 2012. Harapan kami, setelah Anda melalap habis materi pada *newsletter* ini, ada pemahaman yang lengkap dan komprehensif akan arah langkah bank sentral ke depan. Selamat membaca. ●

Salam,
Difi A. Johansyah
Kepala Biro Humas
Bank Indonesia

■ Arah Kebijakan BI 2012:

Wajah Perekonomian Indonesia Akan Semakin *Kinclong*

Tahun 2011 perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang *ciamik*. Ditengah gonjang-ganjing krisis global dan berbagai tantangan di tingkat domestik, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di atas 6%. Harga barang dan jasa terkendali tercermin dari inflasi yang cuma 3,79%. Posisi cadangan devisa nasional menembus angka US\$110 miliar, tertinggi sepanjang sejarah perekonomian republik ini.

Walaupun wajah perekonomian Indonesia di 2011 sudah *kinclong*, berbagai tantangan yang masih mungkin terjadi di 2012 jangan sampai membuat kita lengah. Dari sisi eksternal, krisis keuangan yang membelit negara-negara Eropa masih belum juga memperlihatkan indikasi mereda. Situasi ini membawa risiko terhadap kerentanan pemulihan ekonomi global, bahkan lebih buruk dari perkiraan awal. Mengapa? Pasalnya, kompleksitas krisis Eropa akibat jeratan utang, berpotensi mempengaruhi perekonomian global yang imbasnya juga akan sampai ke Indonesia. Tengok saja bila awalnya Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2012 sebesar 4,4%, angka itu terpaksa direvisi menjadi 3,4% merujuk skenario pemburukan situasi yang berlanjut.

Di sisi internal, setumpuk persoalan yang membelit perekonomian nasional juga tak kalah pentingnya untuk diselesaikan. Beberapa kelemahan struktur mikro baik di sektor keuangan maupun sektor riil masih kerap dijumpai. Misalnya, kontribusi peran sektor perbankan masih belum optimal dalam perekonomian dan tingginya suku bunga kredit. Sedangkan di sektor riil kerap dijumpai kelangkaan barang yang dipicu oleh lemahnya manajemen distribusi dan kurang memadainya kualitas infrastruktur. Sebenarnya kalau mau diurut lagi masih panjang daftar persoalan yang membelit perekonomian nasional.

Dengan karut-marut perekonomian global dan tumpukan persoalan di tingkat domestik, ada potensi wajah perekonomian 2012 bisa *amburadul* jika upaya untuk mengatasinya tidak dipersiapkan dan dilakukan secara optimal. Namun dengan modal dasar stabilitas makro dan kuatnya momentum pertumbuhan ekonomi di 2011 serta optimisme

yang sudah terbangun, prospek ekonomi ke depan masih memiliki harapan. Pada 2012, perekonomian diperkirakan akan tumbuh 6,3% - 6,7%. Tekanan inflasi di tengah krisis global dan persoalan domestik diperkirakan akan tetap stabil dilevel 4,5% ± 1%. Menurunnya BI Rate sejak Oktober 2011 diharapkan mampu menghidupkan sumber-sumber pembiayaan domestik, terutama yang berasal dari sektor perbankan. Laju pertumbuhan investasi yang pada 2011 tumbuh 7,7% diperkirakan masih akan meningkat ke 9,7% - 10,1% pada 2012. Optimisme laju pertumbuhan investasi yang cukup tinggi tersebut bukan cuma mimpi karena Indonesia saat ini sudah masuk dalam zona layak investasi (*Investment Grade*) yang diakui oleh lembaga pemeringkat internasional (*Fitch* dan *Moody's*) yang justru pada saat hampir bersamaan beberapa negara di Eropa mengalami penurunan peringkat *Investment Grade*. Dengan investasi yang meningkat, kegiatan produksi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya dapat menjaga kekuatan daya beli masyarakat.

Untuk mengawal target-target yang telah ditetapkan sekaligus mengantisipasi kemungkinan risiko terburuk, BI selaku otoritas moneter dan perbankan mempersiapkan langkah-langkah yang dikemas dalam 5 (lima) pilar kebijakan mencakup moneter, perbankan, sistem pembayaran, koordinasi pencegahan dan penanganan krisis serta pemberdayaan sektor riil. Kelima langkah tersebut bersama dengan kebijakan lain di bidang perekonomian diharapkan mampu menjadi perangkat yang dapat meredam berbagai gejolak dan risiko yang ada. BI menyadari bahwa arah kebijakan yang disampaikan tidak semata-merta dapat menyelesaikan semua persoalan yang membelit perekonomian Indonesia tanpa dukungan koordinasi yang baik. Diperlukan upaya dari semua elemen bangsa baik regulator, perbankan, dunia usaha maupun masyarakat untuk bersama-sama mengayunkan langkah seirama dalam mengawal kinerja perekonomian nasional.

Nah, kalau semua pihak sudah bersinergi, maka kita optimistis *no mission is impossible*. ...wajah perekonomian Indonesia di 2012 akan semakin *kinclong*! ●

Lima Pilar BI Hadapi Tantangan Ke Depan

Ada indikasi bahwa krisis global yang dipicu krisis utang luar negeri di Amerika Serikat dan kawasan Eropa belum akan mereda dalam waktu dekat ini. Bank Indonesia menyiapkan lima pilar kebijakan guna menghadapi krisis global tersebut dan ikut mengurai tumpukan masalah di perekonomian domestik. Berikut paparannya.

- BI berupaya mengarahkan kebijakan moneter untuk mendorong keberlangsungan sisi suplai. Caranya? Dengan mengotak-atik suku bunga untuk merangsang penyaluran kredit investasi. Di pihak lain, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk membendung risiko karena merosotnya kinerja ekonomi global.
- BI ingin mendorong agar perbankan tidak saja sehat dan kuat, tapi juga berperan secara efektif dan efisien dalam

perekonomian. Apa sih yang dimaksud dengan peran efektif dan efisien? Efektif dalam arti bank berkontribusi dalam pembiayaan kegiatan ekonomi. Efisien dimaksudkan akses masyarakat ke pembiayaan dengan biaya murah.

- BI menyadari bahwa tantangan yang dihadapi sistem pembayaran semakin kompleks dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Untuk itulah BI memandang perlu meningkatkan efisiensi, kehandalan, dan keamanan sistem pembayaran tersebut, termasuk urusan pembayaran dengan luar negeri.
- BI mempersiapkan langkah-langkah untuk membendung dampak krisis global dengan ikut merumuskan Protokol Manajemen dan Pencegahan Krisis (PMK). PMK bisa lebih efektif

dijalankan apabila memiliki pijakan hukum yang kita kenal sebagai UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

- BI mendukung pemberdayaan sektor riil antara lain dengan membuka akses perbankan yang seluas-luasnya bagi masyarakat (*financial inclusion/ FI*) baik dari sisi penyimpanan dan pembiayaan. Dengan kata lain, BI berusaha meningkatkan jumlah masyarakat yang melek bank (*banked people*) dan juga memfasilitasi intermediasi di berbagai sektor potensial. Caranya? Antara lain melalui kampanye "Ayo Ke Bank" dan mengembangkan beragam skim pembiayaan bekerjasama dengan berbagai instansi Pemerintah.

Lima pilar tersebut serta semua perangkat kebijakan yang dicanangkan BI akan dikerahkan guna mengawal stabilitas perekonomian yang telah dicapai dan tetap memberi dorongan bagi perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi dan berkesinambungan. Nah, untuk mencapai tujuan ini, BI tidak bisa bekerja sendiri. Disinilah diperlukan upaya lebih mempererat jalinan koordinasi antara kebijakan moneter, perbankan dan fiskal. ●

Makna Investment Grade



Difi A. Johansyah,
Kepala Biro Humas BI

Seorang Ibu rumah tangga bertanya ke saya, apa makna dari investment grade untuk Indonesia. Seperti yang dia baca dari media, Ibu ini bingung dengan istilah bahwa peringkat utang Indonesia makin baik. Kenapa orang berutang koq makin baik?

Saya terangkanlah pengertian *investment grade* bagi kita. Saya katakan bahwa peringkat *investment grade* berarti Indonesia layak tujuan investasi jangka panjang karena prospek, fundamental dan kebijakan ekonomi yang diambil Indonesia memberikan iklim investasi yang stabil. Saya katakan juga bahwa sebagai konsekuensinya akan makin banyak modal asing masuk ke Indonesia. Begitu juga pengusaha Indonesia bisa memperoleh pembiayaan dari luar negeri dengan lebih murah. Kesemuanya akan menjadikan ekonomi Indonesia yang lebih baik kedepannya.

Demikianlah saya terangkan panjang lebar kepada si Ibu. Namun, saya kemudian heran melihat si Ibu tampak bingung dan tidak bereaksi terhadap jawaban saya. Baru kemudian saya

sadar kalau sedang berbicara dengan seorang yang tahunya ekonomi itu hanyalah suku bunga deposito naik atau turun sebagai imbalan dari tabungan jerih payah suaminya. Seorang yang tahunya dia harus menyediakan tabungan cukup untuk biaya pendidikan anak anaknya yang semakin mahal. Bagi dia, jawaban saya tersebut terasa jauh dengan kebutuhan keseharian ekonomi sebagai seorang ibu rumah tangga.

Setelah memeras otak, akhirnya saya bertanya "Ibu punya kartu kredit atau deposito di bank kan? Sering kan terima tawaran upgrade kartu kredit dan pelayanan jasa bank karena Ibu dianggap bonafide atau nasabah prima? Itulah makna dari *investment grade*". "Oh gitu ya" jawab si Ibu sambil mengangguk. Saya akhirnya cukup puas dengan anggukan dia walaupun kemudian Ibu tersebut berkata pelan "tapi saya khan tidak pernah dan tidak mau berutang!!!". "Ditawarinpun saya gak kan mau!" lanjutnya.

Nah pernyataan terakhir si Ibu ini membuat saya terhenyak. Memang Ibu rumah tangga tadi cuman sebagian kecil dari perekonomian kita, tidak bisa mewakili seluruh ekonomi Indonesia. Dia memang tidak butuh

berutang karena dia tidak memiliki usaha yang butuh pembiayaan. Sementara sebagian lagi pelaku ekonomi kita butuh pembiayaan usaha sehingga *investment grade* lebih bermakna bagi mereka.

Namun terlepas dari siapa yang paling merasakan dampak *investment grade*, yang jelas predikat itu memberikan makna yang lebih luas dari sekedar predikat utang yang lebih. Kebetulan saja, refleksi dari *investment grade* ada pada predikat utang kita, karena itulah indikator utama yang paling gampang dilihat dalam menilai perekonomian suatu negara. Indikator tersebut memberikan penilaian terhadap kemampuan kita membayar kembali utang kita. Semakin bagus indikator tersebut semakin percaya orang kepada kita dalam mengelola utang. Bahwa kita dianggap semakin cantik bukan berarti bisa seenaknya berutang. Berutang seperlunya kalau kita yakin mampu bayar utang kembali. Dan itu sangat tergantung kerja keras kita sebagai suatu bangsa. Kerja keras inilah yang menjadi penilaian utama dalam pemberian predikat *investment grade*, sebenarnya. Utang itu sunnah, kerja keras itu wajib, itulah makna predikat *investment grade*! ●

■ Ekonomi Global 2012:

Jangan Pernah Berhenti Berharap...



Firman Mochtar,
Staf Deputy Gubernur BI dan Analis
Senior di Direktorat Perencanaan
Strategis dan Hubungan
Masyarakat BI

Berbagai kalangan sepertinya sudah kompak menyebutkan ekonomi global di 2012 tidak akan secerah di 2011. Gelagat ini muncul dari ketidakpastian yang terus terjadi sejak paro kedua 2011 dan diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun naga. Diselikuti kekisruhan krisis utang di Eropa, gejala pasar keuangan masih membesar dari waktu ke waktu. Walhasil, situasi yang suram tersebut diperkirakan membuat ekonomi global tumbuh tertatih-tatih pada 2012. Perkiraan itu bahkan bisa dikoreksi menjadi lebih rendah karena gejala tersebut belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Bayangkan, tidak kurang dari Bank Dunia yang semula mematok angka proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2012 sebesar 4,4%, sudah mengoreksi menjadi 3,4%. Begitu pula dengan IMF yang juga masih terbuka kemungkinan untuk mengoreksi ke bawah angka proyeksi dari sebelumnya sebesar 4%.

Kenapa sih kedua lembaga dunia sekaliber IMF dan Bank Dunia sampai mengoreksi proyeksi tersebut? Memang penyelesaian keruwetan krisis utang Eropa tidak jelas kapan akan terselesaikan. Ibarat masih berjalan di lorong yang gelap dan panjang serta belum ada tanda-tanda titik terang. Intensitas dan kerumitan masalah di kawasan Eropa sampai kini belum dapat diukur secara pas. Hal ini mengakibatkan sulitnya menakar kedalaman dampak krisis yang terjadi.

Permasalahan di Eropa memang pelik. Sejak paro kedua 2011 terjadi lingkaran setan yang saling mempengaruhi antara krisis utang (pemerintah di sana), perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Pengalaman empiris beberapa tahun terakhir menunjukkan ketiga permasalahan itu saling berinteraksi dan saling memberikan pengaruh

secara negatif. Prospek fiskal di kawasan Eropa yang belum menentu berisiko terus membuat harga surat utang pemerintah melorot tajam. Padahal surat berharga tersebut banyak dimiliki bank sehingga akan meningkatkan tekanan terhadap neraca bank.

Permasalahannya tidak berhenti sampai di situ karena dengan kondisi fiskal pemerintah dan perbankan seperti di atas, keduanya menjadi tidak memiliki kemampuan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Bila risiko penurunan pertumbuhan ekonomi terus membesar, bukan tidak mungkin akan kembali memberikan tekanan balik kepada peningkatan risiko fiskal dan sektor keuangan. Risiko terus berputar



dan dapat menjaral mempengaruhi perekonomian dunia secara luas sepanjang belum ada kebijakan efektif yang dapat memutus mata rantai lingkaran setan itu. Permasalahan yang membelit Eropa akan menyulitkan ekonomi Amerika Serikat yang saat ini pun sedang berjuang untuk bangkit.

Dari Barat ke Timur...

Sementara itu, cahaya dari ufuk timur masih cukup terang. Dari dunia barat, kegiatan ekonomi kawasan Eropa tentu akan melemah secara signifikan sepanjang permasalahan belum dapat dituntaskan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat juga diperkirakan belum meningkat kuat sepanjang perekonomian kawasan

Eropa belum meningkat. Ekonomi Jepang juga belum meningkat terlalu tajam, meskipun kegiatan rekonstruksi pasca tsunami telah dilakukan. Kondisi di Jepang ini dipengaruhi oleh melemahnya perdagangan global dan juga dampak apresiasi yen terhadap kinerja sektor eksternal.

Sementara itu, cahaya dari ufuk timur masih cukup terang. Meskipun kemerosotan ekonomi global tak terhindari, perekonomian di beberapa negara di belahan timur seperti China, India dan Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh tinggi. Kok bisa begitu? Karena pertumbuhan ekonomi di ketiga negara tersebut mampu ditopang oleh basis-basis sumber pertumbuhan yang berasal dari domestik. Di samping itu, meningkatnya perdagangan di antara negara-negara Asia (*intra regional trade*) menjadikan ekonomi Asia memiliki ketahanan yang cukup kuat ketika kegiatan ekonomi global merosot.

Jangan pernah berhenti berharap...

Sepesimis itukah ekonomi dunia di 2012? Sepatutnya kekhawatiran tersebut menjadi tantangan semua karena tidak ada satu negara pun yang menginginkan kondisi seperti itu akan terjadi. Berbagai upaya telah dan terus akan dilakukan oleh otoritas kebijakan di berbagai negara untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi. Baik kebijakan yang standar maupun yang di luar pakem (*out of the box*) sudah digulirkan untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global. Belum lagi berbagai kerjasama ekonomi secara bilateral, regional dan multilateral baik terkait kebijakan penyelesaian krisis (*crisis resolution*) maupun pencegahan krisis (*crisis prevention*) semarak dilakukan. Dari itu semua, kita tidak boleh pernah berhenti berharap bahwa pemulihan ekonomi global akan dapat segera diraih. ●

Meskipun kemerosotan ekonomi global tak terhindari, beberapa Negara di belahan Timur seperti ekonomi China, India dan Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh tinggi.

Menakar Tantangan Meneropong Prospek Ekonomi 2012



Nanang Hendarsyah,
Staf Gubernur BI dan Analis Eksekutif di
Direktorat Perencanaan Strategis dan
Hubungan Masyarakat BI

Kita saat ini menghadapi lingkungan ekonomi global yang sangat dinamis. Guncangan demi guncangan datang silih berganti seakan-akan adalah sebuah dimensi konstan yang terus menerus mengikuti langkah kita. Ketika ekonomi global masih lemah dan berusaha bangkit dari krisis 2008, pada pertengahan 2010 krisis utang Eropa mengguncang dan seolah tanpa jeda menimbulkan tekanan di pasar keuangan domestik.

Perekonomian Indonesia ternyata mampu membendung beberapa guncangan global tersebut. Pada 2010 dan 2011 ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 6,0%. Bagaimana ekonomi Indonesia dapat bertahan? Terdapat tiga faktor utama yang menopangnya.

Pertama, basis ekonomi Indonesia adalah konsumsi domestik. Sekitar 70% penopang pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Ini berbeda dengan ekonomi Thailand dan Malaysia yang lebih berorientasi ekspor.

Kedua, ekonomi Indonesia ditopang dua pilar kebijakan makro yaitu kebijakan moneter dan fiskal yang dijalankan secara berhati-hati.

Ketiga, ketahanan sektor keuangan Indonesia khususnya perbankan semakin kokoh karena telah dipagari dengan rambu kehati-hatian. Kita telah mengambil pelajaran pahit krisis 1997/1998 untuk lebih hati-hati dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Banyak upaya pembenahan yang dilakukan di perbankan kurun satu dasawarsa terakhir yang bikin perbankan semakin tangguh dan tahan uji dalam menyerap risiko ketidakstabilan makro.

Kekuatan ketiga faktor tersebut merupakan kisah sukses pada tataran makro yang memperoleh pengakuan dari dua lembaga pemeringkat kredit internasional yaitu Fitch Rating dan Moodys. Keduanya baru saja pada

akhir 2011 dan awal 2012 mengembalikan Indonesia ke zona layak investasi. Tentu pengakuan ini bukanlah keberhasilan yang diraih secara tiba-tiba, tetapi setelah Indonesia melalui proses reformasi ekonomi di berbagai bidang. Namun, pengakuan ini juga tidak boleh membuat kita terlena dan terjebak dalam zona kenyamanan yang melunturkan kemampuan kita untuk dapat menjawab tantangan ke depan.

Memang, untuk menjawab tantangan ke depan tidaklah ringan. Banyak tantangan pada tataran mikro yang beberapa diantaranya merupakan beban bawaan yang kita tanggung dari tahun ke tahun dan melahirkan “inefisiensi” baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Bahkan kedua sektor ini sebagai dua mesin yang sejatinya berperan menggerakkan roda kegiatan ekonomi sampai saat ini belum sepenuhnya bersinergi.

Di sektor keuangan, industri perbankan memang menjadi tangguh tapi belum secara optimal melumasi perputaran roda perekonomian. Kita dapat melihatnya dari rasio penyaluran kredit perbankan terhadap PDB di Indonesia yang masih sangat rendah, hanya sekitar 30%. Tingkat itu jauh lebih rendah dari Malaysia, dan Thailand yang mencapai di atas 100%. Meskipun di 2011 lalu pertumbuhan kredit di Indonesia dapat mencapai 24% namun berangkat dari basis yang rendah.

Lantas, kemana likuiditas tersebut sebagian mengalir? Kita dapat melihatnya dari jumlah likuiditas yang ditempatkan oleh bank pada instrumen moneter. Pada 18 Januari 2012 posisinya mencapai Rp 497 triliun. Ini jumlah yang sangat besar dan mencerminkan gambaran yang bertolak-belakang karena likuiditas tersebut sejatinya dibutuhkan sektor riil untuk memutar roda usaha. Ini juga menjadi fakta terdapatnya hubungan yang masih merenggang (*decoupling*) antara sektor perbankan dan sektor riil.

Kalau demikian adanya, kenapa ekonomi masih dapat tumbuh? Kita perlu mencermati hasil survei Bank Indonesia. Hasilnya mengungkap fakta adanya kendala pembiayaan oleh dunia usaha terkait kesulitan dalam mengakses kredit ke bank, yang dikaitkan dengan tingginya suku bunga kredit, ketersediaan jaminan, dan persyaratan kredit yang terlalu rumit. Suku bunga kredit di Indonesia memang sangat tinggi apabila dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Di sektor riil, beberapa titik kendala masih banyak ditemui terkait minimnya ketersediaan infrastruktur dan lemahnya struktur mikro pasar. Ini menyebabkan kemampuan pasokan barang menjadi terbatas dalam memenuhi tingginya permintaan, yang pada gilirannya menekan inflasi tinggi. Kita melihat bagaimana barang kebutuhan pokok seperti beras dan cabai sering bergejolak dan sulit turun. Infrastruktur transportasi yang belum memadai dan kebijakan yang berpihak hanya pada pelaku pasar tertentu (praktek oligopoli) juga merupakan sedikit dari sederet persoalan kusutnya pengelolaan distribusi barang. Akibatnya, kenaikan harga kerap terjadi di tingkat konsumen, bukan produsen.

Luas dan dalamnya tantangan-tantangan yang dihadapi tidak berarti bahwa prospek perekonomian Indonesia otomatis menjadi suram. Memang, di 2012 ekonomi global diperkirakan akan melambat karena dalam krisis Eropa. Namun, penguatan momentum ekonomi masih dapat dipertahankan selama basis-basis pertumbuhan domestik dapat semakin dimantapkan. Untuk mencapai ini, kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral perlu terus bersinergi untuk secara bersama-sama melawan arus (*countercyclical*) dampak perlambatan ekonomi global tersebut.

Dengan skenario tersebut, BI memperkirakan perekonomian Indonesia di 2012 tumbuh 6,3% - 6,7%. BI Rate yang bergerak turun sejak Oktober 2011 dan masuknya Indonesia ke zona layak investasi diperkirakan akan mampu menghidupkan sumber-sumber pembiayaan domestik, baik yang berasal dari sektor perbankan maupun penerbitan surat berharga oleh dunia usaha.

Andalan pertumbuhan ekonomi pada 2012 adalah investasi, yang diperkirakan tumbuh 9,7% - 10,1%, atau meningkat dari 7,7% pada 2011. Dengan investasi yang meningkat akan menyerap lebih banyak angkatan kerja. Ini akan membantu menjaga kekuatan daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga dapat dipertahankan pada tingkat 4,7% - 5,1%.

Dengan meningkatnya investasi seperti pembelanjaan untuk penambahan mesin baru berarti kapasitas produksi akan meningkat. Dengan demikian, dunia usaha memiliki kemampuan memasok barang untuk memenuhi meningkatnya permintaan. Dengan keseimbangan pasokan dan permintaan yang terjaga, inflasi diperkirakan akan tetap stabil di sekitar 4,5%. Terjaganya inflasi di 2012 juga akan terbantu oleh perkembangan harga-harga komoditas di pasar internasional yang melaju rendah karena melambatnya ekonomi dunia. ●

■ Investment Grade

Penantian Empat Belas Tahun: *What's next?*



Nanang Hendarsyah,
Staf Gubernur BI dan Analis
Eksekutif di Direktorat
Perencanaan Strategis dan
Hubungan Masyarakat BI

Di penghujung 2011 lalu dan pembukaan 2012 ini perekonomian Indonesia memperoleh momentum yang sangat penting. Dua lembaga pemeringkat internasional yaitu Fitch dan Moody's menempatkan Indonesia sebagai negara dengan stempel layak investasi (*investment grade*).

Stempel layak investasi ini bukanlah kisah sukses yang diraih secara instan, tapi setelah Indonesia menapaki jalan yang menanjak dan terjal dari jurang krisis 1997/1998. Memang, pada masa krisis 1997/1998 Indonesia sempat terlempar kedalam sebuah zona kelompok negara-negara yang dihindari sebagai tempat investasi. Rating Indonesia merosot 6 notch hanya dalam kurang dari setahun yaitu dari BBB- menjadi B- atau hampir bangkrut (*selective default*).

Begitu dahsyatnya dampak dari status *selective default* yang disandang Indonesia pada masa itu menyebabkan kepercayaan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia luntur seketika. Apa akibatnya? Terjadi gelombang penarikan dana secara besar-besaran dari pasar keuangan domestik yang menyebabkan kurs melonjak berlipat-lipat. Arus pembiayaan dari luar negeri dalam bentuk pinjaman swasta pun tiba-tiba macet (*sudden stop*).

Boleh dibilang, sumber pembiayaan bagi perekonomian menyusut drastis. Ekonomi Indonesia pun mengalami pertumbuhan minus 13% sedangkan inflasi meroket hingga sekitar 70%. Industri perbankan juga harus direkapitalisasi dengan biaya yang sangat besar, dengan berbagai permasalahan ikutannya yang terus dirasakan selama bertahun-tahun.

Baru setelah mengalami jatuh bangun selama 14 tahun, stempel layak investasi kembali dalam genggaman. Keputusan yang diambil lembaga rating Fitch mengangkat rating Indonesia dari BB+ ke BBB- (*investment grade*) dan Moody's

dari Ba1 ke Baa3 (*investment grade*) merupakan konfirmasi masyarakat internasional bahwa Indonesia saat ini dinilai layak menjadi tempat investasi. Pastinya ini adalah sebuah pencapaian yang membesarkan hati pada saat banyak rating negara lain khususnya di negara maju dan banyak negara Eropa yang justru merosot.

Tapi stempel layak investasi tentu bukanlah tujuan akhir. *Investment grade status is the means to an end but not an end in itself*. Itu hanyalah semata merupakan penilaian terhadap posisi Indonesia, selanjutnya tergantung pada bagaimana berbagai pihak dapat memanfaatkan momentum ini.

Indonesia memang sudah masuk radar investor, dan diraihnya stempel layak investasi akan menjadikan Indonesia menjadi magnet bagi investor global. Pertanyaannya, siapakah pasar keuangan Indonesia menampung aliran modal tersebut? Siapakah infrastruktur di dalam negeri memfasilitasi kegiatan produksi dan distribusi barang? Dua pertanyaan ini sangat mendasar. Sudah terlalu banyak diskusi dan konsep besar mengenai hal ini tapi faktanya miskin dengan realisasi.

Untuk dapat mengoptimalkan faedah dari arus modal masuk ke sektor keuangan, maka syaratnya pasar keuangan domestik harus dalam dan likuid. Pasar yang dalam (*deep*), dalam arti tersedia beragam instrumen yang disesuaikan dengan karakteristik investor. Likuid dalam arti pelaku pasar secara mudah dapat membeli dan menjual instrumen pasar dengan biaya yang efisien.

Faktanya, arus modal global yang masuk ke Indonesia saat ini hanya bisa tertampung di Surat Obligasi Negara (ON), dengan pangsa kepemilikan sekitar 30% dari total surat obligasi yang beredar. Oleh karena itu, perlu dipercepat ketersediaan segenap infrastruktur pasar untuk mendorong berkembangnya pasar obligasi yang diterbitkan korporasi

dan lembaga keuangan. Manfaatnya akan banyak buat perekonomian karena arus modal ke obligasi korporasi akan secara langsung digunakan oleh penerbitnya untuk membiayai ekspansi usaha. Adalah sangat naif apabila pengelolaan sektor keuangan di Indonesia hanya semata mengandalkan pada tingginya *yield* atau suku bunga, sementara pasarnya tetap saja dangkal dan tidak likuid. Kalau terus begini, hati-hati harga asset cepat menggelembung (*asset price bubble*).

Bagaimana memanfaatkan arus modal ke sektor riil? Tidak ada yang meragukan, dengan jumlah penduduk yang banyak, dari segi demografi Indonesia adalah potensi pasar yang besar. Pada saat ini tengah terjadi transisi demografi yang didominasi oleh penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap usia produktif sedang dalam tren menurun sehingga bagus untuk pembentukan tabungan dan investasi yang lebih besar, serta pendapatan per kapita ke tingkat yang lebih tinggi.

Banyak investor global yang melihat fenomena tersebut sebagai peluang besar untuk menanamkan modal di Indonesia. Tapi apakah cukup hanya mengandalkan potensi pasar yang besar? Investor akan berpikir ulang apabila sarana dan prasarana produksi tidak memadai bahkan tidak tersedia sama sekali. Untuk menjalankan produksi perlu sarana penunjang misalnya ketersediaan pasokan energi serta kepastian hukum agar tenang dalam menjalankan usaha. Untuk mendistribusikan barang perlu sarana dan prasarana logistik dan transportasi seperti jalan. Beberapa persoalan terkait ketersediaan prasarana untuk kegiatan produksi dan distribusi ini merupakan sebagian dari sederet masalah yang terus hanya menjadi wacana diskusi tapi minim dengan solusi. Sampai kapan Indonesia akan terus berwacana sementara negara-negara tetangga semakin berlari kencang dengan membangun infrastruktur untuk memperkuat ekonominya. ●

Untuk dapat mengoptimalkan faedah dari arus modal masuk ke sektor keuangan, maka syaratnya pasar keuangan domestik harus dalam dan likuid.

■ Dari Pertemuan Tahunan Perbankan 2011:

Bersiaplah Menghadapi Globalisasi Dan Mengikis Inefisiensi



Harymurthy Gunawan,
 Analis Eksekutif di Direktorat
 Perencanaan Strategis dan
 Hubungan Masyarakat BI

Perhelatan tahunan perbankan yang digagas Bank Indonesia (BI) 9 Desember 2011 yang lalu memberikan warna yang agak lain dibandingkan dengan kegiatan serupa yang diselenggarakan pada tahun-tahun sebelumnya. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur BI, Darmin Nasution, pada malam itu terasa tidak hambar. Banyak ungkapan yang bisa membuat merah telinga para pelaku perbankan nasional terkait dengan peran dan kontribusi sektor keuangan tersebut dalam pembangunan ekonomi, masalah inefisiensi, hingga rendahnya daya saing dalam mengantisipasi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang.

Jika direnungkan lebih dalam, apa yang disampaikan Gubernur BI pada malam itu memang sangat faktual. Terdapat benang merah antara peran perbankan dengan upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Tidak dapat dipungkiri pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan merupakan faktor penting yang dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah riil dan harus dapat diatasi bersama, termasuk kontribusi perbankan sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Secara teknis, pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan mengacu pada angka pertumbuhan ekonomi potensial. Berdasarkan estimasi BI pertumbuhan potensial perekonomian Indonesia berada pada tingkat 7,0%, apabila ditopang pertumbuhan investasi minimal 12,0% setiap tahun. Untuk Indonesia, ketersediaan pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menghambat kegiatan investasi di dunia usaha. Hal ini terekam dalam beberapa hasil survei BI yang mengungkapkan adanya kendala pembiayaan bagi dunia usaha karena kesulitan mengakses kredit bank, yang dikaitkan dengan tingginya suku bunga kredit, ketersediaan jaminan, dan persyaratan kredit yang terlalu rumit.

Melihat gambaran itu, tidak mengherankan jika Gubernur BI kemudian mengingatkan agar perbankan melakukan retrospeksi atau perbaikan secara terus menerus tentang bagaimana fungsi dan peran industri perbankan “seharusnya ditempatkan” dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

“Masyarakat mendambakan perbankan yang tidak saja sehat dan kuat, tapi juga berperan secara efektif dan efisien dalam pembiayaan perekonomian. Terciptanya perbankan yang sehat dan kuat di satu sisi, dan perbankan yang dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara efektif dan efisien di sisi lainnya, bukanlah dua hal yang dapat dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang menjadi satu kesatuan,” demikian Gubernur BI Darmin Nasution menegaskan.

Ia mengingatkan pula, apabila perbankan nasional tidak berbenah meningkatkan daya saing, maka akan mempersulit diri dalam menghadapi tantangan yang sudah sangat nyata, yaitu perwujudan MEA 2015. Jika perbankan nasional tidak dapat bersaing dalam era globalisasi maka bukan hanya menjadi kurang mampu untuk mengambil manfaat dari globalisasi tersebut, tetapi hanya akan menerima imbas mudaratnya.

Gambaran paradoksial tersebut antara lain dapat dilihat pada fakta bahwa rasio total aset industri perbankan terhadap PDB di Indonesia telah mencapai 47,2% (September 2011), namun rasio penyaluran kredit terhadap PDB hanya 29,0% (September 2011). Sebagai perbandingan, data Bank Dunia memperlihatkan rasio penyaluran kredit perbankan terhadap PDB di Malaysia, Thailand, dan China masing-masing 114,0%, 117,0%, dan 131,0%.

Dari perspektif dunia usaha, gambaran kurang optimalnya dukungan perbankan juga terlihat. Hasil survei BI mengenai pembiayaan perusahaan pada 2009 mengungkapkan fakta bahwa pangsa kredit bank dari total pembiayaan perusahaan sangat minim, yaitu untuk modal kerja hanya 25%, dan untuk investasi hanya 21%. Sebaliknya, dana internal merupakan sumber utama pembiayaan perusahaan, yaitu 48% untuk modal kerja dan 61% untuk investasi.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Gubernur BI memaparkan, “Tingginya aset industri perbankan tidak diikuti secara seimbang dengan peningkatan kontribusinya bagi perekonomian. Ini karena terdapat bagian dari aset perbankan, yang dari perspektif makro tidak produktif, yaitu

dalam bentuk eksekusi likuiditas yang ditempatkan dalam instrumen moneter dan Surat Bendahara Negara (SBN).”

Kepemilikan bank pada instrumen moneter dan SBN tersebut, selain menunjukkan bahwa eksekusi likuiditas menjadi fakta hubungan yang masih merenggang (*decoupling*) antara sektor perbankan dan sektor riil, juga menggambarkan rendahnya efisiensi operasional bank yang tercermin dari rasio yang membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang mencapai 86,44% per Oktober 2011, bandingkan dengan rasio BOPO perbankan kawasan ASEAN yang berada antara 40% - 60%.

Dengan fakta dan kompleksitas permasalahan yang mewarnai kondisi perbankan nasional, lalu bagaimana BI mengarahkan kebijakannya di 2012? Menurut Gubernur BI Darmin Nasution, “Di bidang perbankan, kebijakan akan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing dan memperkuat ketahanan perbankan dengan tetap mendorong intermediasi bank termasuk memperluas akses masyarakat ke layanan jasa perbankan berbiaya rendah.”

Dalam rangka meningkatkan daya saing perbankan, kebijakan suku bunga dasar kredit (SBDK), akan dilanjutkan untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik yang didukung dengan peningkatan efisiensi dan penurunan suku bunga kredit pada level yang wajar. Sedangkan penguatan ketahanan perbankan antara lain dilakukan melalui peningkatan permodalan, perlindungan nasabah dan kualitas tata kelola perbankan.

Sementara itu, upaya mendorong intermediasi perbankan akan dilakukan BI melalui beberapa langkah kebijakan, antara lain melanjutkan upaya mendukung perluasan akses perbankan (*financial inclusion*) berbiaya rendah, memfasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, dan mendorong perkembangan perbankan syariah baik pengembangan produk dan aktivitasnya.

Melihat berbagai tantangan yang dihadapi, jelas bahwa gerak langkah industri perbankan nasional di 2012 tidaklah lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, respons kebijakan yang akan ditempuh BI diharapkan dapat memberikan optimisme dalam mengatasi semua tantangan itu yang tentu saja sangat memerlukan dukungan dan kerjasama semua pihak. Sinergi yang terbangun pada akhirnya akan menjadi kekuatan dalam **“melepaskan bangsa ini dari segala bentuk inefisiensi, karena apabila tidak, kita hanya akan tergilas oleh globalisasi.”** ●

■ Peran Strategis KBI:

Menjinakkan Inflasi Daerah



Rif'at Pasha,
Analisis di Direktorat Perencanaan
Strategis dan Hubungan
Masyarakat BI

Keberadaan Bank Indonesia (BI) di daerah diwakili oleh hadirnya Kantor Bank Indonesia (KBI). Di seluruh wilayah Indonesia, saat ini ada 41 KBI yang bertugas menjalankan fungsi BI di wilayah kerjanya masing-masing. Salah satu amanah yang diemban KBI adalah mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan stabil di wilayah kerjanya melalui pelaksanaan tugas-tugas pokoknya.

Sejatinya tugas pokok BI selaku otoritas moneter dan perbankan mempengaruhi angka inflasi dari sisi permintaan (*demand*) seperti mendorong dan mempengaruhi peningkatan fungsi intermediasi perbankan dengan kewenangannya selaku regulator.

Dalam bingkai tugas pokok bank sentral itulah, peran KBI di daerah pun tak lepas dari upaya-upaya peningkatan fungsi intermediasi perbankan, khususnya untuk penyaluran kredit pembiayaan ke sektor-sektor produktif di daerah. Masalahnya, masih terdapat gap kepentingan antara bank dan dunia usaha di daerah yang umumnya didominasi UMKM. Bank masih menganggap pola usaha UMKM masih tradisional sehingga dipandang berisiko tinggi. Akibatnya, para pelaku UMKM itu sendiri seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan perbankan.

Contoh kasat mata yang sering terjadi dan banyak dilaporkan media massa adalah betapa payahnya petani mendapatkan akses ke sumber pembiayaan perbankan. Sementara bank sendiri juga menganggap terlalu riskan untuk mendanai kegiatan pertanian. Walhasil, petani pun mencari alternatif pembiayaan ke tengkulak yang membuat biaya produksi menjadi mahal sehingga margin keuntungan petani menjadi semakin tipis.

Untuk menjembatani perbedaan kepentingan itulah, di sejumlah KBI dibentuk Satuan

Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping Mitra Bank (Satgasda KKMB) yang tugasnya mendampingi usaha mikro-kecil menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses pembiayaan dari bank. Dengan terbukanya akses tersebut, biaya dana untuk investasi dan modal kerja usaha jadi lebih murah yang muaranya pada pembentukan harga barang dan jasa yang lebih murah.

Di sisi lain, KKMB juga mendukung misi *financial inclusion* dengan memperluas jangkauan perbankan terhadap UMKM sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi. Sebagai contoh petugas penyuluh pertanian lapangan yang diberi bekal pelatihan KKMB akan membantu petani guna mendapat pembiayaan dari sektor perbankan, merupakan cara lain yang ditempuh KBI. Ketika petani sudah bisa terhubung dengan sektor perbankan, sudah banyak bukti di lapangan yang memperlihatkan produksi bahan pangan meningkat. Hal ini juga bisa terjadi pada proses produksi baranglainnya. Harapannya dengan tersedianya pasokan barang yang cukup akan ikut meredam gejolak harga yang muaranya terlihat pada angka inflasi rendah di wilayah kerja KBI.

Namun demikian, upaya mengurai inflasi melalui hal di atas belumlah cukup. Mengingat persoalan inflasi di daerah, lebih merupakan fenomena yang bersifat struktur-kelembagaan serta faktor-faktor dari sisi suplai. Untuk itu, keberadaan KBI juga ditujukan guna mendukung peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa. Bila produksi dan distribusi barang serta jasa berjalan lancar, diharapkan tidak ada gejolak harga sehingga angka inflasi pun akan lebih terkendali.

Mari kita tengok kembali peran pengembangan sektor riil dan UMKM di KBI dengan mengusung konsep kluster usaha, mengemban amanah sebagai pendorong peningkatan produksi (pertanian, peternakan dan perkebunan) serta mendekatkan petani selaku penyedia barang dengan pembeli. Dengan konsep ini selain me-

tingkatkan ketersediaan barang juga akan memangkas mata rantai panjang distribusi barang sehingga diharapkan harga barang bisa terkendali. Peran KBI dalam konsep ini adalah memberi pelatihan kepada KKMB, mengembangkan kluster usaha tertentu serta menyediakan informasi terkait pemberdayaan UMKM. Inilah sebagian peran KBI dari sisi suplai terkait dengan produksi dan distribusi barang.

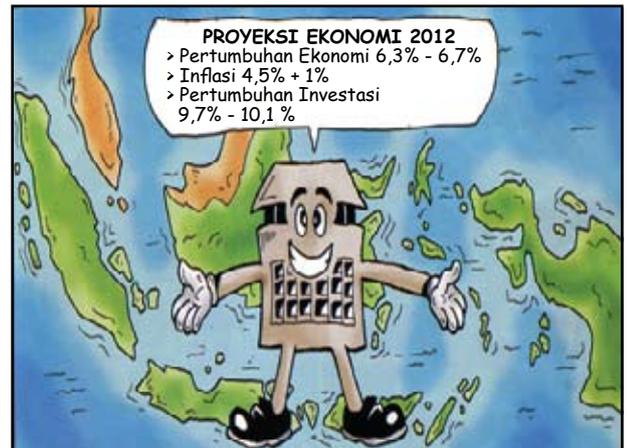
Dalam rangka pengendalian inflasi dari sisi suplai, KBI memandang perlu untuk melakukan koordinasi yang erat dengan pemangku kepentingan di daerah. Untuk itulah KBI bersama dengan unsur pimpinan pemerintah daerah, dunia usaha dan perbankan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tugas TPID melakukan langkah-langkah preventif sebelum gejolak harga terjadi, seperti mengevaluasi sumber dan tekanan inflasi di masing-masing daerah serta bertindak sebagai *advisor* bagi kepala daerah dalam pengambilan kebijakan sebagai tindakan kuratif jika gejolak harga terjadi. Dengan demikian, kehadiran TPID diharapkan menjadi wujud nyata kebersamaan mengelola inflasi melalui semangat *regional incorporated*.

Dengan paparan di atas terlihat jelas bagaimana peran strategis dari KBI yang memainkan fungsi sebagai fasilitator dan katalisator dalam mengelola inflasi di daerah. Untuk itulah peran KBI akan terus didorong agar lebih efektif dalam menjalin kemitraan dengan pimpinan Pemerintah Daerah yang nota bene adalah otoritas pengendali inflasi dari sisi suplai. Jalinan kemitraan ini penting agar tugas TPID dalam mengendalikan inflasi di daerah berjalan efektif.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya maka TPID perlu ditopang dengan sistem informasi harga barang strategis, terutama mencakup informasi mengenai produksi dan stok secara nasional. Disinilah diperlukan komitmen yang kuat dan dukungan dari banyak pihak seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah. ●

**Tugas TPID
melakukan
langkah-langkah
preventif sebelum
gejolak harga
terjadi.**

2012: Ekonomi Indonesia Makin Kinclong!



Ketawa ala BI!

Sebut Dengan H

Dono dan Doni sedang ngobrol-ngobrol...
 Dono: hei Doni tau nggak, Julio Iglesias mau konser di JCC
 Doni: Dono kalau nyebut Julio itu Hulo, gaul dikit dong..
 Dono: Oo.. gitu ya..
 Doni: iya.. Emang kapan konsernya ?
 Dono: kalau nggak Huni, ya Huli...●

Campur Tangan Asing

Seorang suami berkonsultasi ke dokter ahli kandungan karena anaknya menyimpang dari gen ayah ibunya.
 "Apa maksud Anda menyimpang?" tanya dokter.
 "Bayangkan, dok. Anak saya berkulit rada bule, mata kebiru-biruan dan hidung agak mancung. Pada hal tak ada di antara kami yang punya gen seperti itu. Saya curiga ini pasti ada campur tangan asing."
 "Kenapa harus bingung, Tuan? Di negara yang sedang membangun, campur tangan asing bisa diartikan sebagai bantuan kan?"●

Gombal Gembel

Ce : Aku lagi bingung nih.
 Ce : Bingung kenapa?
 Co : Iya bingung aja. Kok kamu bisa ada di sini ya sekarang?
 Ce : Lho maksudnya??? (tambah bingung juga).
 Co : Iya, soalnya aku pikir bidadari tuh adanya di kayangan.
 Co : Neng, bapak kamu pedagang lele ya?
 Ce : Emang kenapa, bang?
 Co : Habisnya, kamu sudah matil hati abang hingga meriang.
 Ce : Ah, abang bisa aja... Abang pedagang narkoba ya?
 Co : Emang kenapa, neng?
 Ce : Habis, gombalan abang bikin ketagihan.
 Ce : Hmm, abang ni seperti lampu ya?
 Co : Kok, lampu? Emang kenapa, neng?
 Ce : Iya kalau lampu: Terus terang, Terus terang.
 Nah kalau abang: Terus terang di hati eneng terus.
 Co : Aihh, eneng.

Ce : Bang, nanti pulang, kita belajar bareng yuk.
 Co : Belajar bareng, ayuk. Tapi belajar apaan?
 Ce : Kita belajar bareng. Aku belajarin hati abang. Abang belajarin hati eneng.
 Co : eh, si eneng.
 Ce : Bang, merem deh.
 Co : Oke, neng..
 Ce : Gelap - enggak?
 Co : Ya, gelaplah neng.
 Ce : Seperti itulah bang, kalau eneng nggak ada abang. Rasanya gelap gimannaa... gitu...
 Ce : Aku mau ke apotik, ahh...
 Co : Mau ngapain?
 Ce : Mau beli formalin.
 Co : Buat apa, sih?
 Ce : Buat ngawetin cinta kita, bang.
 Ce : Nanti malem aku mau tidur pakai kaca mata, ah...
 Co : Loh, kok gitu neng?
 Ce : Iya, biar aku nggak silau ketika kamu muncul di mimpiku...
 Co : wewww...●

Punya Kartu Kredit Hanya Boleh Dua



Bank Indonesia merilis aturan baru terkait alat pembayaran menggunakan kartu khususnya kartu kredit. Beleid yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/11/PBI/2009 tertanggal 6 Januari 2011, intinya mengatur tentang batas maksimum suku bunga kartu kredit, syarat kepemilikan kartu, prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen, keamanan alat transaksi pembayaran hingga penegasan kewenangan BI dalam perizinan dan penerapan sanksi. PBI tersebut merupakan revisi atas regulasi yang sama sebelumnya.

PBI ini diterbitkan dalam rangka menerapkan aspek kehati-hatian, aspek perlindungan konsumen dan memperhatikan manajemen risiko. Terkait hal itu, BI mewajibkan penerbit kartu kredit untuk melakukan perubahan dari penggunaan *magnetic stripe* ke teknologi chip, serta penggunaan PIN sebagai sarana peningkatan keamanan. Untuk

mendeteksi penyalahgunaan kartu oleh pihak lain, penerbit dapat mengirimkan *transaction alert* melalui SMS atau sarana lain sesuai permintaan pemegang kartu.

Begitu pula penerbit kartu kredit wajib memberikan informasi mengenai penutupan fasilitas kartu kredit dan kelonggaran waktu pembayaran jika tanggal jatuh tempo pada hari libur. Sedangkan terkait pembebanan bunga transaksi hanya boleh dikenakan kalau pemegang kartu tidak melakukan pembayaran, atau membayar tidak penuh atau setelah tanggal jatuh tempo. Penagihan oleh pihak ketiga pun dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum dan harus mematuhi etika penagihan.

“Melalui perubahan aturan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih sehat dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu,” ujar Ketua Tim Pengawasan Sistem Pembayaran, Direktorat Akuntansi dan Sistem Pembayaran BI Puji Atmoko. Selain itu, lanjut dia, PBI ini juga diharapkan dapat menekan seminimal mungkin tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi yang dapat merugikan pemegang dan penerbit kartu kredit. Data per akhir 2011, total kartu kredit mencapai 14.594.689.●

Suku Bunga Operasi Moneter Diperlebar



Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG) pada 17 Januari 2012 memutuskan untuk memperlebar koridor bawah suku bunga operasi moneter (*deposit facility*) yang semula 150 bps menjadi 200 bps di bawah BI Rate. *Deposit facility* adalah fasilitas yang disediakan oleh bank sentral untuk menampung kelebihan likuiditas dari bank. Begitu pula sebaliknya, bagi bank yang memerlukan likuiditas, BI menyediakan fasilitas *lending facility* (LF). Suku bunga LF tidak mengalami perubahan.

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas perekonomian di tengah meningkatnya ketidakpastian sistem keuangan global yang dipengaruhi oleh krisis Eropa dan AS. Meskipun gejolak yang ditimbulkan ketidakpastian perekonomian global masih terbatas, BI terus mencermati dampak penurunan kinerja ekonomi dan keuangan global terhadap kinerja perekonomian Indonesia ke depan.

Dengan mulai diberlakukannya kebijakan baru ini, diharapkan pasar uang antar bank akan semakin likuid, dan bisa mengurangi ketidakpastian likuiditas sehingga *overhead* dan premi resiko akan turun. Hal itu dapat memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan sekaligus dapat meningkatkan efisiensi perbankan.●

Kesepakatan “Penanaman Modal Akhirat”



Lazimnya akronim PMA kependekan dari Penanaman Modal Asing, namun akronim itu punya pemaknaan baru ditangan Pemimpin Bank Indonesia (PBI) Surabaya Mohamad Ishak menjadi Penanaman Modal Akhirat. Hal itu dilontarkannya saat menyaksikan penandatanganan akta perjanjian kerjasama antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Badan

Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka sertifikasi tanah milik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Jatim.

“Dengan sertifikasi itu UMKM bisa mengajukan kredit usaha atau modal kerja ke bank sehingga mengangkat derajat hidup jutaan rakyat dari lingkaran kemiskinan. Jadi semua pihak yang ikut membantu terlaksananya program itu akan mendapatkan pahala kebajikan yang akan terbawa sampai ke akhirat,” tandas Mohamad Ishak.

Merujuk hasil survei BI terhadap UMKM di Jatim, masih banyak tanah milik UMKM berupa girik yang belum bersertifikat sehingga tak bisa dijadikan agunan ke bank. Melalui program ini setidaknya bakal ada 146.000 bidang tanah milik petani, peternak, nelayan dan pengusaha kecil yang akan disertifikasi mulai 2012 hingga 2014.●

Pertambangan Emas Bikin Cantik Gorontalo

Emas tak pernah kehilangan kilau daya tariknya dari masa ke masa. Siapa yang memilikinya akan mendapat daya tarik

tersebut. Begitu pula dengan Kabupaten Bone Bolango di Propinsi Gorontalo yang diketahui memiliki deposit emas dan tembaga sebesar 130 juta ton sontak berkicau dengan kandungan emas itu. “Bone Bolango adalah masa depan Gorontalo dan akan merubah wajah wilayah ini secara signifikan di masa depan,” tandas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango, Dr Rusliyanto Monoarfa ketika menggelar rapat dengar pendapat rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) bersama Kantor Bank Indonesia (KBI) Gorontalo dan perbankan setempat.

Sebelum rapat dengar pendapat itu digelar, KBI Gorontalo bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sempat mengadakan seminar bertajuk “Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Bone Bolango”. Sumber referensi pemetaan potensi ekonomi tersebut berasal dari hasil penelitian KPJU yang dilakukan KBI. Sentra-sentra KPJU dan rencana ke depan menjadi salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan Panitia Khusus (Pansus) RTRW dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten Bone Bolango. Untuk itulah ekspansi pertambangan emas yang nantinya digarap oleh PT Gorontalo Mineral selama kurun 30 tahun ke depan, haruslah bersinergi dengan pengembangan wilayah ke depan.

Pimpinan Bank Indonesia (PBI) Gorontalo, Wahyu Purnama menilai rencana eksploitasi pertambangan emas tersebut sesuatu yang positif. Hanya saja perlu dicermati dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi agar kasus serupa di wilayah lain di dalam negeri seperti di Buyat dan Bima tidak terjadi di Gorontalo. “BI sepenuhnya mendukung upaya pengembangan komoditas unggulan daerah serta mengajak perbankan meluaskan jaringan kantor cabangnya di Bone Bolango yang selama ini belum begitu dilirik,” ujar dia. ●



Taman Nani Wartabone, salah satu icon Gorontalo

Ketika BI Ke Pasar Pantau Harga Beras



Pemimpin BI Bandung, Lucky Fathul meninjau operasi pasar Bulog di Pasar Kiaracondong Bandung didampingi Kepala Bulog Divre Jabar dan Kepala Disperindag Provinsi Jabar

Terbetiklah kabar bahwa harga komoditas pertanian dan peternakan di wilayah kota Bandung dan kota-kota lain di Jawa Barat mengalami gejolak. Gejolak harga ini sudah barang tentu berpotensi mengganggu stabilitas inflasi. Untuk mengetahui apa sesungguhnya terjadi, Pimpinan Bank Indonesia Bandung Lucky Fathul bersama Kepala Perum Bulog

Divre Jabar Usep Karyana dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Ferry Sofwan Arif sepakat melakukan inspeksi ke pasar-pasar di Bandung. Pemantauan ini mengajak serta pula anggota Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) Jabar.

“Kami mencermati adanya kenaikan harga seluruh komoditas pertanian dan peternakan

karena adanya keterbatasan pasokan. Oleh sebab itu, operasi pasar beras yang dilakukan ini semoga dapat kembali menstabilkan harga beras di pasar,” ujar Lucky Fathul saat meninjau Pasar Kiaracondong dan Pasar Kosambi di Bandung, 5 Januari 2012. Dari hasil pantauan di lapangan, kata dia, rata-rata harga beras untuk semua kualitas pada 2 Januari 2012 mencapai Rp8.242 per kilogram, naik Rp200 dari bulan sebelumnya.

Untuk stabilisasi harga kebutuhan pangan khususnya beras, Bulog Divre Jabar menyediakan beras untuk operasi pasar (OP) hingga 18 ton/hari sampai harga dinilai terkendali. Harga eceran tertinggi untuk beras OP ini adalah Rp6.600 per kilogram. “Hal ini merupakan bentuk intervensi

dari sisi penawaran untuk mengendalikan harga,” ungkap Usep Karyana. Dijelaskannya lebih lanjut, intervensi juga dilakukan dengan menyalurkan beras untuk warga miskin (Raskin) ke-13 kepada sekitar 2,8 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menurunkan permintaan beras di pasaran. ●

Hoorree ... Sekolahku “Dibedah” Jadi Bagus Lagi

Di tengah kemegahan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, siapa yang sangka masih menyisakan serakan sejumlah gedung-gedung sekolah yang kondisi fisik bangunannya cukup memprihatinkan. Padahal di tempat-tempat itulah generasi muda bangsa sedang digembleng dan menuntut ilmu. Melihat kondisi memprihatinkan itulah, Bank Indonesia bersama Kodam Jaya/Jayakarta terdorong untuk ikut membangun kembali gedung-gedung tersebut. Digagaslah program “Bedah Sekolah” di bawah payung Bank Indonesia Social Responsibility (BSR) dan program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMMD). Dalam program ini, pekerjaan fisik memperbaiki gedung sekolah dilakukan sendiri oleh para prajurit TNI.

“Pembangunan di bidang pendidikan, selain dikerjakan negara, juga harus dibantu oleh unsur



masyarakat lain. Penyamaan persepsi untuk kepedulian pendidikan melahirkan kerja bersama, mengingat pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa,” ujar Direktur Perencanaan Strategis dan

Humas BI Dyah NK Makhijani, saat menutup kegiatan Bedah Sekolah dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di SD 05 Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat, 11 Januari 2012. Penutupan program Bedah Sekolah dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim MS, Perwira Staf Ahli Pangdam Jaya, Perwira LO AL dan AU, dan jajaran Kodam Jaya.

Program Bedah Sekolah dan PAUD ini telah menasar 27 lokasi yang tersebar di sejumlah lokasi di Jakarta, Bekasi dan Depok. Setelah tahap pertama rampung, BI dan

Kodam Jaya sepakat untuk menindaklanjutinya. Setidaknya ada 16 sekolah lagi yang akan dibangun. “TNI selain bertugas menjaga keamanan negara juga wajib mendukung upaya pembangunan negara antara lain di bidang pendidikan,” ujar Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris.

Kini, anak-anak sekolah yang sekolahnya sudah dibedah pun bisa tersenyum kembali. Hoorree... Sekolahku bagus lagi! ●

Memorabilia De Javasche Bank



Kota Surabaya di Jawa Timur menambah satu lagi koleksi tujuan wisata bersejarah yakni mengunjungi eks gedung De Javasche Bank. Gedung yang dibangun 14 September tahun 1829 ini berada di Jalan Garuda dalam kawasan historik Jembatan Merah. Singgah di De Javasche Bank akan membawa memori pengunjung ke era kolonial yang mana gedung ini pernah dipakai sebagai bank sirkulasi peredaran mata uang gulden ketika

itu. Tahun 1910 gedung ini sempat dirobohkan dan dibangun kembali dengan gaya *neo renaissance* di atas lahan seluas 1.000 meter. Ketika era kemerdekaan Republik Indonesia tiba, De Javasche Bank pun berganti nama menjadi Bank Indonesia di tahun 1953. BI memakainya sebagai kantor hingga tahun 1973. Setelah itu gedung tersebut hanya dipakai sebagai gudang.

Menyadari keberadaan eks gedung De Javasche Bank memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya bangsa (*national heritage*), mengalirlah gagasan untuk melakukan konservasi. Upaya konservasi yang melibatkan banyak pihak ini merujuk standar yang ditetapkan oleh UNESCO yang memaklumkan tidak boleh ada perubahan atas gedung tersebut. Setelah tiga tahun melakukan proses persiapan dan pengerjaan fisik gedung, pada Jumat, 28 Januari 2012, rampunglah konservasi gedung ini. Selain sebagai

agar budaya bersejarah, gedung eks De Javasche Bank pun akan dipakai untuk kegiatan memorabilia dan UMKM non pameran.

“Upaya pelestarian bangunan bersejarah ini tidak hanya dalam perspektif regenerasi dan revitalisasi fisik semata, namun juga dalam perspektif membangun sektor kultural masyarakat. Ini merupakan upaya kita menjalankan proses pembangunan bangsa yang benar,” ujar Gubernur BI Darmin Nasution saat meresmikan rampungnya proses konservasi. Dikatakannya pula, pelestarian bangunan warisan budaya ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah dan swasta yang memiliki bangunan bersejarah dapat melakukan upaya serupa. Selain gedung eks De Javasche Bank di Surabaya, BI juga memelihara dan memanfaatkan 13 gedung kantor eks De Javasche Bank lainnya yang ada di Jakarta, Yogyakarta, Solo, Bandung, Padang, Medan, Aceh, Cirebon, Kediri, Malang, dan Manado. ●

“Desa Kita” Srikaton Terpilih Jadi Terbaik

Ibu-ibu Desa Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, Propinsi Bengkulu Tengah tidaklah pernah membayangkan akan menginjakkan kaki di Istana Negara dan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun apa yang mereka kerjakan dan hasilkan telah membuat terkesima banyak pihak termasuk Presiden SBY. Kisah pun diawali ketika kaum perempuan itu mengikuti program transmigrasi bersama keluarga mereka dari Gunung Kidul dan Bantul di Yogyakarta ke Bengkulu Tengah di tahun 1972. Memulai kehidupan baru di daerah transmigran sangatlah berat. Umumnya mereka melakukan budidaya tanaman kelapa sawit. Tapi karena hasil tanaman itu baru bisa dipetik kurun lima tahun, mau tak mau mereka mesti putar otak untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

Berkisahlah Surahman, Kepala Desa Srikaton akan awal hari-hari kehidupan mereka di daerah transmigran. Sambil menanti hasil dari

kelapa sawit yang mereka tanam, warga desa menyambung hidup dengan budidaya ikan lele. Namun karena terbatasnya modal yang mereka miliki, hasilnya pun belumlah optimal. Sampai suatu ketika di 2010 datangnya program “Desa Kita” sebagai wujud kepedulian sosial



Bank Indonesia ikut membantu meningkatkan budidaya lele di Srikaton. Bantuan BI melalui Kantor BI di Bengkulu awalnya memberi pelatihan budidaya ikan lele, ayam petelur

dan jamur tiram. Selain itu, digelontorkanlah 24 kolam terpal berukuran 5x7 m untuk 24 keluarga, benih ikan lele dan pakannya. Seiring dengan perjalanan waktu, jumlah kolam itu kini mencapai 170 buah.

Selain ikan lele, KBI Bengkulu juga membantu budidaya ayam petelur bagi enam kelompok warga di Srikaton. Setiap kelompok yang terdiri tiga orang itu mendapat pasok 300 ayam petelur plus kandang dan pakannya. Ambil contoh Sutinem dari Kelompok Semangat yang bisa memproduksi 180 butir telur sehari yang dijual seharga Rp28.000 per 30 butir. Saat ini total produksi telur ayam desa Srikaton mencapai 1.200 butir sehari. Budidaya jamur tiram menjadi alternatif lain bagi warga desa untuk budidaya. Setidaknya saat ini sudah ada empat kelompok yang setiap kelompok terdiri dua orang melakukan budidaya jamur tiram. Banyaknya kaum ibu yang terlibat dalam kegiatan perekonomian keluarga di Desa Srikaton inilah yang membuat mereka terpilih sebagai kelompok PPK terbaik tingkat nasional dan bertemu Presiden SBY. Desa Srikaton barulah satu dari banyak “Desa Kita” binaan BI. ●

Lomba Foto

Newsletter gerai info Bank Indonesia

Untuk lebih mendekatkan Newsletter gerai info dengan Anda semua, kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk menjadi bagian dari Newsletter gerai info. Foto karya terbaik anak bangsa akan tampak mewarnai setiap edisi Newsletter gerai info.

No.	Pilihan Tema	Keterangan
1.	Alam Indonesia nan Elok	Foto menampilkan lansekap alam dengan karakter / identitas Indonesia atau daerah tertentu di Indonesia yang memberikan arti/dampak positif bagi pelestarian dan pengembangan pariwisata Indonesia. Contoh: Danau Toba, Gunung Bromo.
2.	Rumah Adat	Foto menampilkan bentuk (bagian luar) rumah adat dengan karakter / identitas budaya atau daerah tertentu di Indonesia yang memberikan arti/dampak positif bagi pelestarian dan pengembangan budaya serta pariwisata Indonesia. Contoh: Rumah adat Minangkabau, rumah adat Dayak.
3.	Kekayaan Ragam Hias Indonesia	Foto menampilkan ragam hias dengan karakter / identitas budaya atau daerah tertentu di Indonesia yang memberikan arti/dampak positif bagi pelestarian dan pengembangan budaya serta pariwisata Indonesia. Contoh: kain, ukiran, pahatan, patung.
4.	Dinamika Aktivitas Perekonomian	Foto diharapkan dapat menampilkan proses atau kegiatan ekonomi Indonesia yang memberikan arti/dampak positif bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Contoh : transaksi jual beli, kegiatan produksi, pasar, industri.



Hadiah untuk masing-masing tema:
 1 Pemenang I sebesar Rp 5 juta
 1 Pemenang II sebesar Rp 4 juta
 1 Pemenang III sebesar Rp 3 juta
 3 Pemenang Harapan sebesar @ Rp 1 juta
 Seluruh pemenang akan mendapatkan sertifikat.



Foto diterima paling lambat 29 Februari 2012, pukul 13.00 WIB di sekretariat panitia dengan alamat:

Sdri. Evi Eliza
Bank Indonesia (Dint/PTLN)
Menara Sjafruddin Prawiranegara lantai 4
Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat 10350.
Telp.021-3818294

- Setiap peserta dapat menyerahkan foto cetak warna atau hitam putih hasil karya sendiri dengan ukuran sisi terpendek 20 cm dan sisi terpanjang maksimal 30 cm, dilengkapi dengan data tema lomba foto yang diikuti, judul foto, nama peserta dan nomor identitas (KTP/SIM), nomor telepon dan/atau HP, alamat email (jika ada).
- Informasi lengkap mengenai lomba foto ini dapat diperoleh di website Bank Indonesia di menu Info Terbaru.